



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM)
UNIT KERJA : BALAI POM AMBON

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TAMRAN ISMAIL
2. Jabatan : KEPALA BALAI
3. NHK : 443582

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.090.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA KUPANG , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. Tanah Seluas 250 m2 di KAB / KOTA KOTA KUPANG , HASIL SENDIRI Rp. 62.500.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 107 m2/78 m2 di KAB / KOTA ENDE, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
4. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA ENDE, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
5. Tanah Seluas 5180 m2 di KAB / KOTA ENDE, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
6. Tanah Seluas 3500 m2 di KAB / KOTA ENDE, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 168 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA KUPANG , HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
8. Tanah Seluas 590 m2 di KAB / KOTA KOTA KUPANG , HASIL SENDIRI Rp. 147.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. ----

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 324.652.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 23.898.461

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.438.550.461



III. HUTANG

Rp. 229.785.136

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.208.765.325

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.